

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2019-2022



MEI TINCE LARA

1910321034

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2019-2022



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program
Studi Akuntansi**

MEI TINCE LARA

1910321034

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2019-2022

disusun dan diajukan oleh:

MEI TINCE LARA

1910321034

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 4 September 2023

Pembimbing



Herawati Dahlan, S.E., M.Ak
NIDN: 0905077106

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2019-2022

disusun dan diajukan oleh:

MEI TINCE LARA

1910321034

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **4 September 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN: 0905077106	Ketua	1
2.	Suriyadi Nur, S.E., M.Ak., CDVP NIDN: 0901038306	Anggota	2
3.	Akmal Hidayat, S.E., M.Si., CDVP NIDN: 0922108001	Anggota	3
4.	Ghaliyah Nimassita Triseptya, S.E., M.Si NIDN: 0903099101	Eksternal	4

Dekan Fakultas Ekonomidan
Ilmu-ilmu Sosial Universitas
Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA.
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mei Tince Lara

Stambuk : 1910321034

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, "Analisis kinerja keuangan pada daerah Kabupaten Tana Toraja periode 2019-2022" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain demi memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dan dikutip dalam naskah ini kecuali disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 4 September 2023



at pernyataan,

Mei Tince Lara

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim.....

Alhamdulillahirobbil'aalamin, segala Puji dan Syukur Atas Kehadirat ALLAH Subuhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Daerah Kabupaten Tana Toraja Periode 2019-2022”**.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih serta rasa hormat kepada orang tua tercinta ayahanda Luther Rapang dan Ibunda Ester Alik yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan peneliti sehingga bisa sampai pada tahap ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Herawati Dahlan, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan, motivasi, saran serta membantu peneliti selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Fajar Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Ibu Dr. Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.
3. Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar Ibu Yasmi Nurdin, S.E., M.Si., Ak., C.A., C.T.A., A.C.P.A

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Yang telah Memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga yang akan menjadi bekal bagi peneliti kedepannya.
5. Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar, Kak Juliana Sartika Djafar, S.E., M.Si yang telah memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat dari awal penyusunan skripsi hingga akhir penyelesaian skripsi.
6. Saudara yang telah banyak membantu dan meberikan semangat serta motivasi yang sangat berharga mulai dari awal penyusunan skripsi sampai akhir.
7. Teman-teman Wacana yang telah meberikan semangat serta dukungan dan membantu banyak hal dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Kim Minseok, Kim Junmyeon, Zhang Yixing, Byun Baekhyun, Kim Jongdae, Park Chanyeol, Doh Kyungsoo, Kim Jongin, dan Oh Sehun sebagai member EXO yang telah memberi pengaruh positif, inspirasi, dan motivasi kepada penulis secara tidak langsung melalui karyanya.
9. Kepada seluruh member NCT terutama Huang Renjun dan Jeong Jaehyun yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 4 September 2023

Mei Tince Lara

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2019-2022

**Mei Tince Lara
Herawati Dahlan**

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan kinerja keuangan daerah menggunakan empat rasio yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja keuangan daerah kabupaten Tana Toraja periode 2019-2022. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan selama periode tahun 2019-2021 dikategorikan kurang dan mengalami kenaikan pada tahun 2022, meskipun pada tahun 2022 mengalami kenaikan tetapi kenaikannya belum signifikan dan masih dikategorikan kurang. 2) Rasio kemandirian mengalami penurunan pada tahun 2019-2021 dikategorikan rendah sekali dan mengalami kenaikan pada tahun 2022, meskipun pada tahun 2022 mengalami kenaikan tetapi kenaikannya belum signifikan dan dikategorikan rendah sekali. 3) Rasio efektivitas mengalami penurunan pada tahun 2019-2021, pada tahun 2019 dikategorikan kurang efektif, tahun 2020 dikategorikan cukup efektif kemudian pada tahun 2021 dikategorikan kurang efektif. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan dan kategorikan sangat efektif. 4) Rasio efisiensi mengalami penurunan selama periode 2019-2021 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2019-2022 secara berturut-turut selama 4 tahun masuk kedalam kategori efisien.

Kata Kunci: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio efisiensi

ABSTRACT

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN THE TANA TORAJA DISTRICT FOR THE 2019-2022 PERIOD

**Mei Tince Lara
Herawati Dahlan**

Assessment of financial performance is one way to assess the performance of local governments in regional financial management. In managing regional financial performance, four ratios are used, namely the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of independence, the ratio of effectiveness and the ratio of efficiency. This research was conducted to assess the regional financial performance of the Tana Toraja district for the 2019-2022 period. In this study using a quantitative descriptive method. Collecting data with the method of literature study, interviews, observation, and documentation. The type of data used is primary data and secondary data. From the results of the study it can be seen that 1) The ratio of the degree of fiscal decentralization has decreased during the 2019-2021 period which is categorized as lacking and has increased in 2022, although in 2022 it has increased but the increase has not been significant and is still categorized as lacking. 2) The independence ratio has decreased in 2019-2021 which is categorized as very low and has increased in 2022, even though in 2022 it has increased but the increase has not been significant and is categorized as very low. 3) The effectiveness ratio decreased in 2019-2021, in 2019 it was categorized as less effective, in 2020 it was categorized as quite effective then in 2021 it was categorized as less effective. Then in 2022 it will increase and be categorized as very effective. 4) The efficiency ratio has decreased during the 2019-2021 period and has increased in 2022. In 2019-2022 consecutively for 4 years it has entered the efficient category.

Keywords: Degree of Decentralization Ratio, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI SAMPUL	i
SKRIPSI JUDUL	ii
SKRIPSI PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
SKRIPSI PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8
2.1.1 Kegunaan Laporan Keuangan	11
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan.....	12
2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	13
2.2.1 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	15
2.2.2 Manfaat Pengukuran Kinerja.....	16
2.2.3 Indikator Kinerja Keuangan Daerah	16
2.3 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.4 Analisis Rasio Keuangan Daerah	18
2.4.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	20
2.4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	21
2.4.3 Rasio Efektivitas	23
2.4.4 Rasio Efisiensi	24
2.5 Tinjauan Empiris.....	25
2.6 Kerangka Pikir	27

BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
3.3 Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja	35
4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah	35
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja ...	36
4.2 Hasil Penelitian	45
4.2.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	45
4.2.2 Rasio Kemandirian	47
4.2.3 Rasio Efektivitas	48
4.2.4 Rasio Efisiensi	50
4.3 Pembahasan	51
4.3.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	51
4.3.2 Rasio Kemandirian	54
4.3.3 Rasio Efektivitas	57
4.3.4 Rasio Efisiensi	59
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Anggaran PAD, Realisasi Anggaran PAD, Total Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja	5
Tabel 2.1 Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	21
Tabel 2.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	22
Tabel 2.3 Kategori Tingkat Efektivitas PAD	23
Tabel 2.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	25
Tabel 2.5 Daftar Referensi Penelitian.....	25
Tabel 3.1 Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	31
Tabel 3.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	32
Tabel 3.3 Kategori Tingkat Efektivitas PAD	33
Tabel 3.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	34
Tabel 4.1 Data Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan.....	45
Tabel 4.3 Perbandinagn Derajat Desentralisasi Fiskal PAD dan Total Pendapatan	46
Tabel 4.3 Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	46
Tabel 4.4 Data PAD dan Pendapatan Transfer.....	47
Tabel 4.5 Perbandingan Rasio Kemandirian PAD dan Pendapatan Transfer.....	48
Tabel 4.6 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	48
Tabel 4.7 Data Realisasi PAD dan Anggaran PAD.....	48
Tabel 4.8 Rasio Efektivitas Realisasi PAD dan Anggaran PAD	49
Tabel 4.9 Kategori Tingkat Efektivitas PAD	49
Tabel 4.10 Data Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah.....	50
Tabel 4.11 Rasio Efisiensi Realisasi PAD dan Anggaran PAD	50
Tabel 4.12 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4.1 Struktur Orgaisasi Badan Pendapatan Daerah.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pemerintahan daerah merupakan organisasi yang diberikan kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk mengelolah keuangan daerah dengan efisien dan efektif guna mencapai tujuan pembangunan yang tetap. Evaluasi kinerja keuangan daerah menjadi hal yang penting untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan yang optimal dan hasil yang maksimal.

Diera reformasi ini, telah terjadi berbagai perubahan dibidang ekonomi, sosial, dan politik yang berdampak signifikan terhadap percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang terkait dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam kebijakan pemerintah, demokrasi dalam pengambilan keputusan masyarakat dan keseragaman penetapan hukum. Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemberdayaan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta dalam Perimbangan Keuangan Pusat" merupakan dasar hukum dikeluarkannya UU. No 32 Tahun 2004 & UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang kini telah menjadi UU No. 33 Tahun 2004.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan wewenang dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan secara mandiri dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi pedoman awal pelaksanaan otonomi daerah dalam

pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya alam daerah sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi masing-masing daerah.

Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten/kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah memerlukan sistem keuangan yang baik untuk mengelola anggaran pendapatan belanja daerah yang bersifat efisien dan akuntabel.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka terjadi perkembangan yang signifikan dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, dari sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja dari sistem akuntabilitas *vertical* menjadi sistem akuntabilitas horizontal, dari sistem akuntansi single entry dan cash basis menjadi sistem akuntansi double entry dan accrual basis.

Menurut Haryani (2013) pendapatan asli daerah merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah yaitu seluruh penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk menutupi anggaran pengeluaran, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Semua pendapatan dan belanja yang terkait pelaksanaan otonomi dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah. Sistem pengelolaan daerah (UU No. 32 Tahun 2004), kinerja keuangan akan baik bila ada pengelolaan dalam kinerja keuangan daerah yang baik.

Laporan keuangan perlu di analisis untuk memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja dapat dapat dijadikan evaluasi dan digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya, antara lain adalah melakukan analisis keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian, efektifitas dan efisiensi PAD.

Dalam teori derajat desentralisasi fiskal menurut Mahmudi (2016) mengemukakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD), maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Sedangkan menurut Halim (2014) mengemukakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah.

Rasio efektivitas menurut Mahmudi (2016) mengemukakan bahwa semakin tinggi efektivitas kinerja semakin baik dan semakin rendah efektivitas berarti akan semakin buruk. Kemudian teori efisiensi menurut Halim (2016) mengemukakan bahwa semakin besar aoutput dibandingkan input, maka semakin tinggi efisiensi organisasi.

Penelitian mengenai kinerja keuangan daerah yang sudah beberapa kali dilakukan. Diantaranya peneliti yang dilakukan Natalia (2015) juga melakukan penelitian tentang "Analisis Laporan Keuangan Daerah Mengukur Kinerja

Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman” hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran, rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lazyra (2016) dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan” mengemukakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Medan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak pemerintah daerah yang tidak mencukupi dan pengeluaran yang meningkat yang melebihi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah kota Medan. Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang disebutkan diatas yaitu terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, selain itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Menurut Haryani (2013) pendapatan asli daerah merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah yaitu seluruh penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk menutupi anggaran pengeluaran, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam kaitannya dengan Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tanggungjawab dalam menjalankan tugas pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana dalam menjalankan aktivitasnya sebagai

penyelenggara pemerintahan yang menggunakan dana publik baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) ,maupun yang bersumber dari transfer pusat tentunya perlu melakukan penilaian kinerja untuk melihat bagaimana kinerja keuangan daerah Tana Toraja di lihat dari beberapa perfektif rasio.

Berikut ini adalah data anggaran PAD, realisasi anggaran, total anggaran belanja dan realisasi belanja dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Anggaran PAD, Realisasi Anggaran PAD, Total Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi Anggaran	Total anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2019	187.752.107.000	119.464.168.341	1.328.335.248.000	979.371.368.464
2020	125.559.974.000	110.936.063.512	1.067.319.774.800	925.348.493.641
2021	123.145.081.957	87.883.164.973	1.022.435.599.921	867.918.072.184
2022	163.616.303.916	170.331.502.274	1.148.751.316.973	997.314.352.809

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target anggaran PAD dan realisasi anggaran selama 4 tahun mengalami fluktuasi atau mengalami kenaikan dan penurunan begitupun dengan total anggaran belanja dan realisasi belanja selama 4 tahun juga mengalami fluktuasi atau mengalami kenaikan dan penurunan. Untuk tempat penelitian penulis memilih kabupaten Tana Toraja sebagai tempat penelitian karena melihat fenomena pendapatan asli daerah (PAD) yang rata-rata mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis seberapa efektif pendapatan asli daerah kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kinerja keuangan dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Daerah Kabupaten Tana Toraja Periode 2019-2022**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Periode 2019-2022?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari Rasio Kemandirian Periode 2019-2022?
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari Rasio Efektivitas Periode 2019-2022?
4. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari Rasio Efisiensi Periode 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Periode 2019-2022
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari Rasio Kemandirian Periode 2019-2022
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari Efektivitas Periode 2019-2022
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari Efisiensi Periode 2019-2022

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri atas dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam kinerja keuangan serta sebagai pengimplementasi pengetahuan selama ini telah diperoleh di perguruan tinggi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi dilapangan pada sektor keuangan khususnya kinerja keuangan daerah.

b. Bagi Kantor Bapenda Kab. Tana Toraja

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna membenahi kinerja keuangan, supaya bisa secara menyeluruh meningkatkan instansi.

c. Bagi Universitas Fajar

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan ataupun referensi kepustakaan khususnya mengenai penilaian risiko akun pada laporan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pencapaian kinerja keuangan adalah penyajian laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2010), menyajikan laporan keuangan untuk pemerintah daerah memiliki tujuan umum sebagai berikut:

1. Untuk menyampaikan informasi penting dalam pengambilan keputusan politik, social, dan ekonomi.
2. Sebagai alat akuntabilitas pemerintah.
3. Untuk menawarkan data dalam menilai kinerja manajerial dan organisasi.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Linda (2018) komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menunjukkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan atau kesesuaian terhadap APBN/APBD. laporan realisasi anggaran memberikan gambaran tentang asal, dan penggunaan dana yang dikelolah oleh negara atau penyelenggara dalam 1 periode pelaporan. Dalam Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan adalah jumlah total uang yang diterima selama suatu daerah selama tahun fiskal tertentu yang meningkatkan ekuitas dana, menjadi milik pemerintah, dan tidak dikenakan pembayaran kembali.

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori :

- a) Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah
 - b) Dalam perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbangan dari pemerintah pusat.
2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam waktu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayaran oleh pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
- a) Belanja aparatur daerah merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bahan bangunan gedung dan lain sebagainya.
 - b) Belanja pelayanan publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jabatan dan jalan raya dan sebagainya.
 - c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan meliputi:
- a) Sumber penerimaan daerah
 - b) Sumber pengeluaran daerah

- c) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan atau suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- d) Catatan atas laporan keuangan memberikan daftar terinci atau analisis atau dinilai yang diungkapkan dalam laporan kinerja anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lainnya yang pengungkapannya diharuskan dan direkomendasikan oleh peraturan akuntansi negara, serta ekspresi yang diperlukan untuk persiapan penyajian pelaporan.
- e) keuangan secara wajar.

b. Neraca

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun selama periode keuangan perusahaan dan menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa:

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masalalu dan dari mana manfaat ekonomi atau social masa depan diharapkan atau dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat serta aset diukur dalam satuan rupiah, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

2. Kewajiban (utang)

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah pada masa yang akan datang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah lampiran laporan keuangan tahunan berisi penjelasan rinci mengenai komponen laporan keuangan tahunan serta komponen neraca, laporan pelaksanaan anggaran dan arus kas. Pemerintah daerah diwajibkan menyajikan informasi tambahan dari laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan umum. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diwajibkan dan dianjurkan untuk pelaporan didalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan agar dapat menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

2.1.1 Kegunaan Laporan Keuangan

Laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan memegang peran yang luas dan

mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang menanamkan modal juga memerlukan informasi pelaporan keuangan tentang kelancaran operasi dan hasil dari perusahaan serta kemungkinan deviden karena dengan informasi ini para pemegang saham dapat memilih apakah akan menahan, menjual atau membeli sahamnya. Dapat dipahami jika dengan adanya laporan keuangan yang disediakan oleh pihak manajemen perusahaan maka dapat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa laporan keuangan sangat bermanfaat untuk menilai kondisi perusahaan saat ini dan yang akan datang.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan monitor. Tujuan laporan keuangan secara garis besar yaitu:

1. *Screening* (saran informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seseorang analisis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
2. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya
3. *Diagnosis* (peramalan), analisa dapat digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang
4. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.

Dalam konteks hubungan laporan keuangan dan pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manager keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Informasi itu harus bermanfaat dan dipahami.
2. Informasi harus relevan dengan pengambilan keputusannya.
3. Informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya.
4. Informasinya harus memiliki sifat daya banding.

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan output/hasil yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian, kemampuan keuangan daerah merupakan tingkat kegiatan, mengatur, mengelola, dan menguasai sumber daya daerahnya dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan di daerah, kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APDB.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja bidang keuangan daerah

dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Menurut Fahmi (2016) laporan keuangan adalah setiap informasi yang menggambarkan keadaan atau hubungan yang berkaitan dengan urusan ke moneter entitas tertentu, informasi tersebut juga berisi tambahan yang lebih rinci yang dapat digunakan untuk menentukan aktivitas operasi moneter entitas selama pengoperasian urusan moneter entitas tertentu. Ini juga dapat berisi informasi tambahan yang lebih rinci sehingga dapat digunakan untuk menentukan aktivitas operasi moneter entitas selama periode waktu tertentu. Sedangkan Laporan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang didalamnya terdapat dari satu atau lebih entitas akuntansi yang dimana nantinya harus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan diperiode tertentu yang dapat digunakan untuk kepentingan instansi atau publik. Dari kedua kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah gambaran atau keadaan suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang memberikan informasi tentang kegiatan instansi tersebut selama periode waktu tertentu.

Sistem pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi pemerintah Daerah dapat dicapai apabila administrasi dan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah dilakukan pada tingkat ekonomis, efisien dan efektif.

Pada dasarnya ada dua perspektif utama tentang fungsi lembaga pemerintah, yaitu prespektif keuangan dan non keuangan, namun dalam konteks subjek yang diangkat oleh penulis dibalik permasalahan tersebut sehingga

difokuskan pada kinerja keuangan. Istilah kinerja keuangan dikenal luas dikalangan keuangan. Hasil ekonomi adalah tingkat pencapaian (efisiensi) pegawai dan perkembangan teknologi informasi. Penilaian kinerja perusahaan atau instansi pada uraian diatas merupakan penilaian kinerja berdasarkan aspek non keuangan yang dikenal dengan balanced scorecard. Meskipun kinerja dinilai dari dua aspek (keuangan dan non keuangan) namun dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah kinerja badan pendapatan daerah ditinjau dari aspek keuangan, dan tujuan umumnya adalah untuk mengevaluasi kinerja dalam kaitannya dengan pencapaian hasil keuangan daerah atau lembaga.

2.2.1 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah

5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.2.2 Manfaat Pengukuran Kinerja

Berikut manfaat yang tercakup dalam pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (Kusufi, 2014) sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja
2. Memberikan arahan untuk mencapai target yang ditetapkan.
3. Memantau dan mengevaluasi suatu pencapaian kinerja serta membandingkannya dengan target kerja dan menerapkan tindakan korektif untuk meningkatkan kinerja.
4. Sebagai landasan untuk memberikan pengakuan dan kosekuensi yang objektif (*reward and punishment*) atas pencapaian yang terukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai sarana komunikasi antara bawahan dan pemimpin untuk meningkatkan kinerja organisasi.
6. Membantu dalam menentukan apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi.
7. Membantu dalam memahami setiap proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.2.3 Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah harus di tingkatkan. Sejalan dengan tujuan organisasi pemerintah daerah, adapun indikator dalam kinerja keuangan meliputi :

1. Indikator Masukan (*Inputs*), contohnya :
 - a) Jumlah uang yang dibutuhkan

- b) Jumlah karyawan yang dibutuhkan
 - c) Volume infrastruktur yang ada
 - d) Waktu yang digunakan
2. Indikator Proses (*Proces*), contohnya :
- a) Ketetapan pada standar prosedur operasi
 - b) Rata-rata yang diperlukan dalam memproduksi atau meluncurkan produk penyediaan layanan
3. Indikator Keluaran (*Proces*), contohnya :
- a) Jumlah komoditas atau kebijakan yang dihasilkan
 - b) Ketetapan bagian dalam membangun muatan dan kebijakan
4. Indikator Hasil (*Outcome*), contohnya :
- a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b) Produktivitas para pegawai dan karyawan
5. Indikator Manfaat (*Benefit*), contohnya :
- a) Tingkat kepuasan bagi masyarakat
 - b) Tingkat partisipasi bagi masyarakat
6. Indikator *Impact*, contohnya :
- a) Peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat
 - b) Peningkatan pendapatan dalam masyarakat

2.3 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Menurut Wachid (2014) bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan merupakan upaya untuk mengidentifikasi indikator keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada. Tujuan analisis kinerja keuangan adalah untuk membantu memahami laporan keuangan, menginterpretasikan laporan keuangan, mengevaluasi laporan keuangan dan menggunakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sering dianalisis untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran (LRA)

2.4 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut Mahsun (2011) laporan keuangan daerah merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terdapat APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai aturan penamaan dan pengukuran.

Namun dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD harus dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dalam satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungannya. Selain itu, ada juga yang dapat dilakukan untuk membandingkan rasio keuangan dalam suatu daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi dasar relative sama untuk melihat bagaimana posisi keuangan rasio pemerintah daerah tersebut dengan pemerintah daerah lainnya.

Ada dua hal yang bisa dijadikan indikator kinerja yaitu anggaran terkait kinerja dan anggaran kinerja. Kinerja anggaran adalah alat yang digunakan DPRD untuk menilai kinerja kepala daerah, sedangkan anggaran kinerja adalah alat yang digunakan secara eksklusif oleh DPRD untuk menilai kinerja pejabat daerah. Indikator kinerja untuk mengukur apakah suatu program tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Banyak indikator yang digunakan untuk menilai atau mengukur kinerja yang paling umum adalah analisis surplus/deficit APBD.

Analisis surplus deficit APBD merupakan satu-satunya tugas terpenting dalam kebijakan moneter surplus dan defisit tingkat pemerintah daerah. Dalam PP 23 Tahun 2003, PP 58 Tahun 2005, PMK No, 45 Tahun 2006, dan PMK No. 72 Tahun 2006 tugas ini dilaporkan. Hasil ini akan dijadikan salah satunya dasar perencanaan kebijakan keuangan nasional sebagai anggaran tahun yang akan datang.

Pelaksanaan analisis persyaratan pada kepatuhan pada dalam pembatasan yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta komposisi penyebaran skala deficit yang diperbolehkan dalam surplus pada masing-masing pemerintah daerah

Beberapa rasio pengukuran kinerja keuangan daerah menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2016) mengemukakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD), maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

2. Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2014) mengemukakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah.

3. Rasio Efektivitas

Menurut Mahmudi (2016) mengemukakan bahwa semakin tinggi efektivitas kinerja semakin baik dan semakin rendah efektivitas berarti akan semakin buruk.

4. Rasio Efisiensi

Menurut Halim (2016) mengemukakan bahwa semakin besar out put dibandingkan input, maka semakin tinggi efisiensi organisasi.

Dengan demikian pemerintah daerah setiap mengukur kinerja keuangannya dapat menggunakan beberapa rasio kinerja keuangan daerah antara lain rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

2.4.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Mahmudi (2016) Rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM Bisma (2010) menggunakan skala interval seperti pada tabel berikut:

Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat desentralisasi fiskal

PAD = Pendapatan asli daerah

TP = Total pendapatan

Tabel 2.1
Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi fiskal %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Bisma (2010)

2.4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim 2014 semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah rasio kemandirian daerah, maka tingkat ketergantungan suatu daerah pihak eksternal semakin tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan bagi mereka yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan. Rasio kemandirian keuanagn daerah ditunjukkan dengan besarnya pendapatan awal daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain (pendapatan transfer).

Antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil pajak bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjam. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{PAD}{Penda[atran Transfer]} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi 2010

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terdapat bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Kusuma (2014)

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, merupakan campuran tangan pememrintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah

- 3) Pola hubungan partisipatif, peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.4.3 Rasio Efektivitas

Menurut Mahmudi (2016) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas dapat menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi 2016

Kemampuan efektivitas pendapatan asli daerah digolongkan dalam 5 tingkat efektivitas yaitu :

Tabel 2.3
Kategori Tingkat Efektivitas PAD

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
Sangat efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	<60%

Sumber: Mahmudi 2016

- 1) Jika persentasinya lebih dari 100% ($x > 100\%$) situasinya sangat efektif

- 2) Jika presentasi antara 90% dan 100% ($90\% < x < 100\%$) itu menunjukkan keefektifan
- 3) Jika diperoleh nilai 80% sampai 90% ($80\% < x < 90\%$) umumnya dianggap cukup efektif
- 4) Jika nilai diperoleh 60% sampai 80% ($60\% < x < 80\%$) ini menunjukkan kurang efektif
- 5) Jika nilainya dibawah 60% ($x < 60\%$) berarti metode tersebut tidak efektif

2.4.4 Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2016) rasio efisiensi keuangan menggambarkan perbandingan umum antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang sebesar-besarnya diterima. Mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, penerimaan daerah dapat dikatakan efisiensi jika rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Maka dari itu, pemerintah daerah harus menghitung dengan cermat berapa banyak uang yang digunakan untuk merealisasikan semua pendapatan yang diterima untuk menentukan efektif atau tidaknya pengumpulan pendapatan. Hal ini diperlukan karena meskipun pemerintah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, keberhasilan tersebut akan berkurang jika biaya untuk menghasilkan penerimaan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010)

Tabel 2.4
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Tidak efisien	>100%
Efisiensi berimbang	100%
Efisien	<100%

Sumber: Mahmudi (2016)

2.5 Tinjauan Empiris

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, disertakan beberapa penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Daftar Referensi Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Joko Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian yaitu pada aspek kemandirian dan aspek keserasian . adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian.
2.	Lazyra (2016)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kota Medan mengalami penurunan melalui penggunaan rasio keuangan penurunan ini disebabkan tidak mencukupinya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kota Medan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi

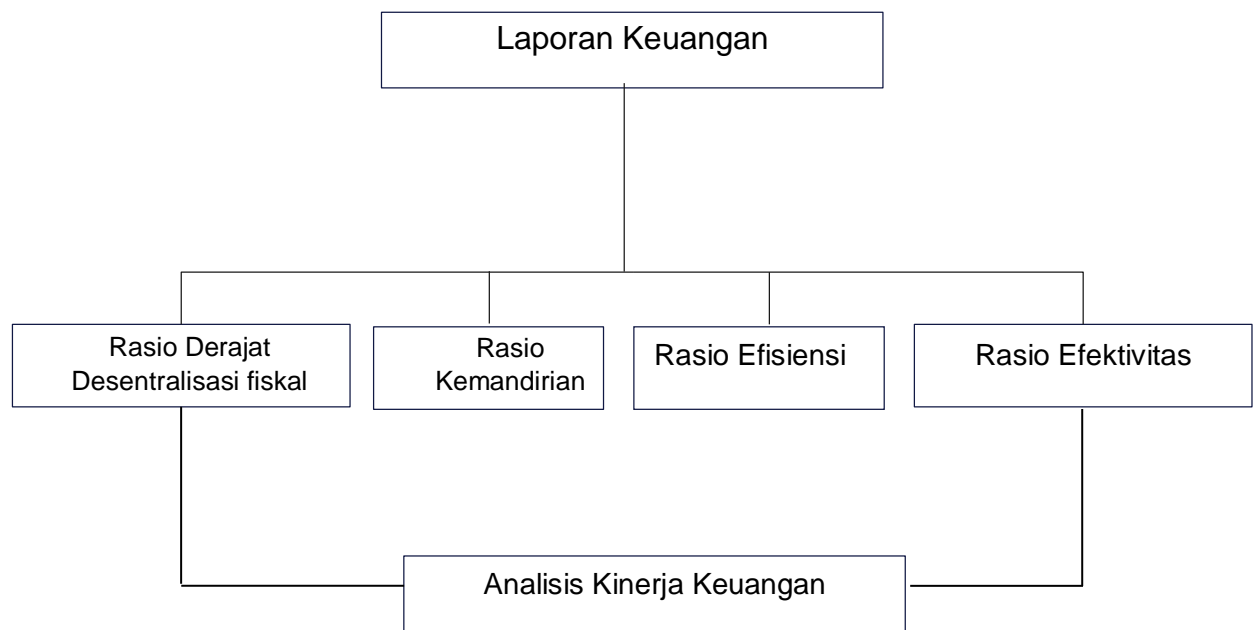
3.	Anim Rahmayati (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran (2011-2013)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih rendah. Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.
4.	Listiyani Natalia (2015)	Analisis Laporan Keuangan Daerah Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian

Sumber : Data diolah (2023)

2.6 Kerangka Pikir

Untuk memperjelas konsep dan arahan penelitian, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber : Data diolah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk merangkum semua rencana yang disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul selama proses penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan alamat Jalan Sultan Hsanuddin No. 3, kecamatan Makale, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah terhitung 2 bulan dari bulan Juni sampai bulan Juli 2023.

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang merupakan objek penelitian atau orang-orang yang digunakan dalam memperoleh data atau informasi. Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Adapun data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari BAPENDA Kabupaten Tana Toraja.

b. Data Sekunder

Menurut Sujarweni (2017) data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan sebagainya.

Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2019-2022
2. Data Total PAD kabupaten Tana Toraja tahun 2019-2022
3. Data Total Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019-2022
4. Data Total Anggaran Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2019-2022
5. Data Total Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019-2022
6. Data Total Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019-2022

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diterima langsung dengan cara memperoleh data secara langsung. Dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara

Menurut Sugiyono (2014) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh data dari pegawai badan pendapatan kabupaten Tana Toraja.

2. Studi kepustakaan

Menurut Setyosari (2012) metode ini digunakan untuk memperoleh landasan teori yang kuat untuk memecahkan masalah guna mendukung data yang diperoleh dari buku-buku perpajakan dan akuntansi serta referensi lainnya berkaitan dengan topik yang dipilih.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Suwerjani (2017) analisis data adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengukur, mengatur, mengorganisasikan, memilah, dan mengkategorikan untuk menemukan suatu temuan berdasarkan suatu masalah yang perlu ditangani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana pengertiannya merupakan sebuah sistem sudut pandang atau metode observasi yang berusaha menjalankan dan menyajikan situasi pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi.

Penelitian ini menggunakan rasio kinerja keuangan pemerintah daerah yang melibatkan beberapa parameter dalam bentuk rasio, yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal didasarkan pada perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. rasio ini menunjukkan besarnya kontribusi pendapatan mandiri terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli

daerah (PAD), maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

$$DDF = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi fiskal %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Bisma (2010)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Mahmudi 2016 mengemukakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD), maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio kemandirian keuangan suatu daerah (RKKD) mengungkapkan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai sendiri operasi pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan layanan kepada penduduk yang membayar pajak yang berfungsi sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Beberapa pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten Tana Toraja antara lain pajak daerah, pajak retribusi, hasil pengelolaan harta terpisah dan PAD lain yang sah.

$$RKKD = \frac{PAD}{Penda[atran\ Transfer]} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Kusuma (2014)

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, merupakan campuran tangan pememrintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Menurut Halim (2014), semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah rasio kemandirian daerah, maka tingkat ketergantungan suatu daerah pihak eksternal semakin tinggi.

3. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2016) rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi aktual daerah yang tercermin dalam rasio efektivitas pendapatan asli daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan efektivitas pendapatan asli daerah digolongkan dalam 5 tingkat efektivitas yaitu :

Tabel 3.3
Kategori Tingkat Efektivitas PAD

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
Sangat efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	<60%

Sumber: Mahmudi 2016

- 1) Jika persentasinya lebih dari 100% ($x > 100\%$) situasinya sangat efektif.
 - 2) Jika persentase antara 90% dan 100% ($90\% < x < 100\%$) itu menunjukkan keefektifan.
 - 3) Jika diperoleh nilai 80% sampai 90% ($80\% < x < 90\%$) umumnya dianggap cukup efektif.
 - 4) Jika nilai diperoleh 60% sampai 80% ($60\% < x < 80\%$) ini menunjukkan kurang efektif.
 - 5) Jika nilainya dibawah 60% ($x < 60\%$) berarti metode tersebut tidak efektif.
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014) rasio efisiensi keuangan daerah (RKKD) menggambarkan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan pendapatan yang diterima sebenarnya. Belanja daerah meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan belanja tidak terduga. Berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, pemungutan pendapatan yang efisien dapat dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil

rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.4
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Tidak efisien	>100%
Efisiensi berimbang	100%
Efisien	<100%

Sumber: Mahmudi (2016)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja

Badan pendapatan daerah (BAPENDA) merupakan salah satu unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Badan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu bupati dalam menunjang urusan pemerintah dibidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Selain bertugas membantu bupati dalam menunjang urusan pemerintah, badan pendapatan daerah, pemantau, evaluasai, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan daerah.

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah

Paradigma pemerintah menjadi desentralisasi dari sentralisasi yang diidentifikasi melalui pemberian otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab juga harus didukung oleh pembiayaan dengan sumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), Sehingga pemda Tana Toraja menentukan kebijakan serta langka dengan menerbitkan Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Tana Toraja selanjutnya Perbup No. 40 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbup Tana Toraja No. 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah kabupaten Tana Toraja.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja

1. Visi

“Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tata-tatanan Kehidupan Baru”.

Rumusan visi ini memberi penekanan pada kemampuan daerah keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19 yang secara signifikan berdampak negative terhadap stabilitas social-ekonomi yang hamper semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Visi “Tana Toraja Bangkit, Produktif, dan Tangguh Menyongsong Tata-tatanan Kehidupan Baru” ini mengandung tiga kata kunci (*Clue*) yaitu:

1. Tana Toraja bangkit bahwa pemerintah kabupaten Tana Toraja berkewajiban menghadirkan tindakan nyata untuk memulihkan kehidupan sosial – masyarakat ekonomi yang terpuruk akibat dari pandemi Covid-19 berupaya menghidupkan aktifitas sosial masyarakat dan menggerakkan kegiatan perekonomian daerah dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan selama 5 tahun kedepan jumlah miskin masyarakat berkurang, produktivitas dan pendapatan masyarakat meningkat, tingkat respons menurun, jumlah masyarakat terdidik meningkat, derajat kesehatan masyarakat meningkat, akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang dibutuhkan, mudah dijangkau, serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat semakin mambeaik. Demikian pula halnya dengan kesejahteraan seluruh jajaran aparat pemerintah pada semua tingkat maupun meningkat.
2. Tana Toraja produktif faktor penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat kabupaten Tana Toraja 5 tahun ke depan adalah kesiapan serta kesungguhan pemerintah kabupaten bersama mengelola potensi

unggulan, peternakan dan perikanan air tawar disamping bidang-bidang usaha potensial lainnya (ekonomi, kreatif, UMKM, dan sektor jasa) agar senantiasa produktif dan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

3. Tana Toraja tangguh bahwa pembangunan kabupaten Tana Toraja 5 tahun kedepan akan menciptakan kondisi bagi munculnya prakasa-prakasa masyarakat, keswadayaan, semangat gotong-royong, kemampuan beradaptasi serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial, ekonomi, etilogi, ketentraman hidup masyarakat pun akan terwujud karena didukung oleh kehidupan kerohanian masyarakat yang semakin berkualitas, terbangunnya tatanan kehidupan yang memiliki sifat kebersamaan, persaudaraan, kepedulian, kesetiakawanan sosial, rukun, dan toleransi serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya.

2. Misi

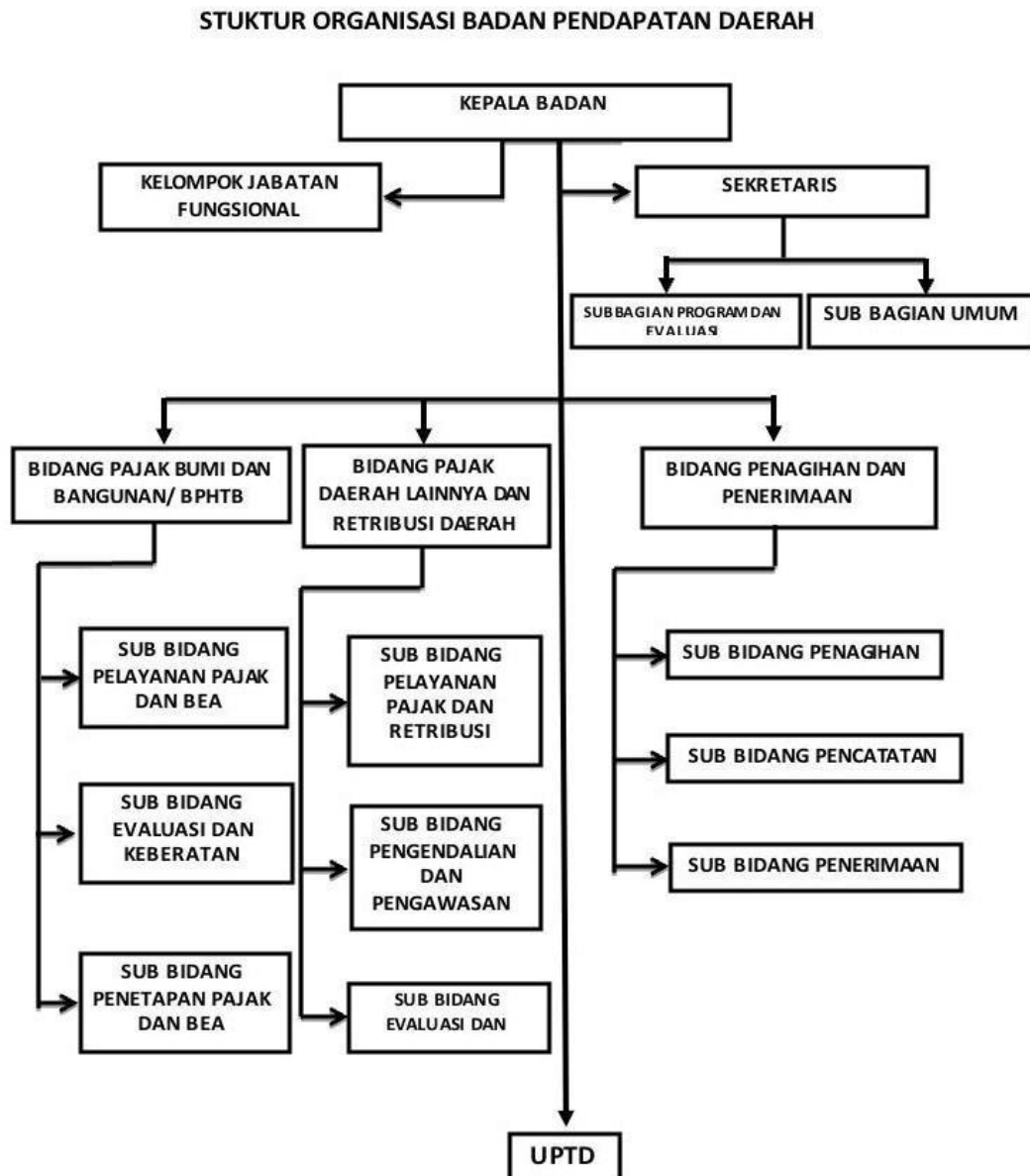
Untuk mewujudkan Visi “Tana Toraja Bangkit, Produktif, dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru” kedalam bentuk program-program nyata yang mampu dilaksanakan dan dinilai pencapaiannya selama jangka waktu 5 tahun (2021-2026), maka ditentukan misi berupa :

1. Mengoptimalkan tatanan kelola pemerintah yang baik, bersih, tanggap, peduli, berbasis kinerja yang didukung oleh teknologi infoemasi dan komunikasi (*E-Governancel*).
2. Memantapkan sistem pencegahan, penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimal pelayanan kesehatan.
3. Memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan belajar/mengajar

4. Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat disektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan air tawar, UMKM, industry rumah tangga, ekonomi kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya.
5. Mewujudkan potensi pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegritas selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelolah kelestarian lingkungan hidup.
6. Membangun, memperbaiki, dan memelihara infrastruktur (jalan, jembatan dan drainase) serta sarana-prasarana publik vital.
7. Menguatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, dan moral.

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Sumber: Badan pendapatan daerah

Setiap badan organisasi kantor Bapenda Kab. Tana Toraja mempunyai fungsi serta tugas yang bervariasi. Ada pula tugas setiap bagian tersebut yaitu:

1. Kepala Badan

- a. Mengawasi, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas guna melihat perkembangan dari pelaksanaan tugas.
- b. Membentuk program kerja serta rencana selaku acuan dalam pelaksanaan tugas.
- c. Menyusun rancangan, mengkoreksi, menandatangani naska dinas serta menghadiri rapat yang diadakan.
- d. Mengkoordinasi kegiatan badan baik teknis maupun administrasi ke Bupati, DPRD, dan intalasi teknik terkait.

2. Sekertariat

- a. Menyusun rancangan kegiatan sekertariat selaku acuan pada pelaksanaan tugas.
- b. Mengawasi, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pada lingkup sekertariat guna melihat perkembangan dari pelaksanaan tugas.
- c. Berpartisipasi pada rapat sejalan pada bidang tugas
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, seta menandatangani naska dinas.

Sekertariat membawahi dua sub bagian:

1) Sub bagian umum

- a. Membentuk perencanaan aktivitas sub bagian umum serta kepegawaian selaku acuan pada pelaksanaan tugas
- b. Mengawasi, memantau, serta mengevaluasi dalam pelaksanaan tugas pada lingkup sub bagian umum serta kepegawaian guna melihat perkembangan pelaksanaan tugas.

- c. Mendistribusi pemberian petunjuk pelaksanaan tugas supaya berlangsung lancar
- d. Memfasilitasi serta mengkoordinasi administrasi surat perjalanan serta dinas tugas pegawai
- e. Membentuk perancangan, mengoreksi, serta dalam menandatangani naskah dinas

2) Sub Bagian Program dan Evaluasi

- a. Membentuk perencanaan aktivitas sub bagian program serta evaluasi selaku acuan pada pelaksanaan tugas.
- b. Mengumpulkan serta menyajikan informasi serta data perencanaan program maupun aktivitas badan.
- c. Mendistribusikan pemberian petunjuk pada staf sehingga pelaksanaan tugas berlangsung dengan lancar.
- d. Mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan program dalam lingkup badan.
- e. Mempersiapkan bahan, memantau, serta mengevaluasi kinerja.

3. Badan Pajak Bumi dan Bangunan dan PTHTB

Kepala bidang mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan serta penentuan PBB-P2 serta BPHTB.
- b. Pelaksanaan daftar induk wajib pajak, melaksanakan penghimpunan serta pengelolaan data subjek maupun objek PBB-P2 serta BPHTB.
- c. Melaksanakan penyusunan daftar induk wajib PBB-P2 serta BPHTB
- d. Perhitungan serta penetapan PBB-P2 dan BPHTB.

- e. Melaksanakan, mendistribusikan, serta menyimpan surat perpajakan yang berhubungan pada daftar, pendataan, dan penentuan PBB-P2 serta BPHTB.

Bidang pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan bidang PBB-P2 serta BPHTB selaku acuan pada pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan pendistribusian serta memberi pedoman pelaksanaan tugas hingga berlangsung lancar.
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintah pimpinan sejalan pada bidang tugas.

Sub bidang penetapan pajak dan bea diketuai kepala sub bidang yang bertugas membantu serta menyokong pelaksanaan tugas kepala bidang PBB-P2 serta BPHTB untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan bahan maupun data penentuan pajak dan bea data yang berkaitan pada PBB-P2 serta BPHTB.

Sub bidang evaluasi dan keberatan diketuai kepala sub bidang yang bertugas membantu serta menyokong pelaksanaan tugas kepala bidang PBB-P2 serta BPHTB untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan bahan maupun data terkait pelaporan juga penanganan masalah PBB-P2 serta BPHTB

4. Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah

Kepala bidang mempunyai tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah lainnya serta retribusi daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pajak daerah lainnya serta retribusi daerah

- c. Penyelenggaraan pemantauan serta pembinaan pada para sub bidang di bawahannya
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pajak daerah lainnya dan retribusi daerah
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang atasan berikan.

Bidang pajak dan retribusi daerah memiliki tugas :

- a. Mengelolah data subjek dan objek (diluar BPHTB maupun PBB), juga retribusi daerah dengan surat ketetapan pajak daerah dan pemeriksaan lapangan/lokasi atas tembusan surat dinas dari instansi daerah.
- b. Mempunyai surat retribusi serta perpajakan daerah yang berhubungan pada pendapatan
- c. Melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang kepala dinas berikan sejalan dengan tugas pokok serta fungsi.

Sub bidang pelayanan pajak dan retribusi diketuai kepala sub bidang yang bertugas menyokong kepala bidang pajak daerah lainnya serta retribusi daerah untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan data.

Sub bidang pengendalian dan pengawasan diketuai kepala sub bidang yang bertugas menyokong kepala bidang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan data dan bahan.

Sub bidang evaluasi dan keberatan diketuai kepala sub bidang yang bertugas menyokong kepala bidang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan data.

5. Bidang Penagihan dan Penerimaan

Fungsi dari kepala bidang meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang penagihan serta penerimaan
- b. Melaksanakan administrasi bidang penagihan serta penerimaan
- c. Mengumpulkan data sumber penerimaan lain diluar pajak da retribusi daerah
- d. Melaksanakan penanguhan pajak serta retribusi daerah sejalan pada aturan.

Bidang Penagihan dan Penerimaan memiliki tugas:

- a. Merencanakan aktivitas bidang penagihan dan penerimaan selaku acuan pada pelaksanaan daerah
- b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naska dinas
- c. Menagih retribusi serta pajak daerah sejalan pada aturan guna mencukupi target penerimaan
- d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang atasan perintahkan sejalan pada bidangnya.

Sub bidang penagihan diketuai kepala sub bidang yang tugas menyokong kepala bidang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan data bahan penagihan pendapatan serta penerimaan pembiayaan.

Sub bidang penerimaan diketuai kepala sub bidang dengan tugas menyokong kepala bidang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan bahan maupun data penerimaan.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana pengertiannya merupakan sebuah sistem sudut pandang atau metode observasi yang berusaha menjelaskan dan menyajikan situasi pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio kemandirian bertujuan melihat kinerja keuangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memakai teknik triangulasi karena penelitian ini berusaha membandingkan data dengan sistem yang berbeda untuk memperoleh kebenaran dan informasi yang tepat terhadap data yang didapat.

4.2.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Mahmudi (2016) mengemukakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD), maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Tabel 4.1
Data Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan

Tahun	PAD	Total Pendapatan
2019	187.752.107.000	1.190.812.429.313
2020	125.559.974.000	1.132.684.863.534
2021	123.145.081.957	1.102.376.766.452
2022	163.616.303.916	1.178.979.065.165

Sumber: Data diolah (2023)

Rumus perhitungan dari rasio derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$$

Sumber: Bisma (2010)

Rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung sebagai berikut:

- a. Derajat desentralisasi fiskal tahun 2019 = $\frac{187.752.107.000}{1.190.812.429.313} \times 100\%$
= 15.77%
- b. Derajat desentralisasi fiskal tahun 2020 = $\frac{125.559.974.000}{1.132.684.863.534} \times 100\%$
= 11.09%
- c. Derajat desentralisasi fiskal tahun 2021 = $\frac{123.145.081.957}{1.102.376.766.452} \times 100\%$
= 11.17%
- d. Derajat desentralisasi fiskal tahun 2022 = $\frac{163.616.303.916}{1.178.979.065.165} \times 100\%$
= 13,88%

Tabel 4.2

Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Data Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase	Keterangan
2019	187.752.107.000	1.190.812.429.313	15.77%	Kurang
2020	125.559.974.000	1.132.684.863.534	11.09%	Kurang
2021	123.145.081.957	1.102.376.766.452	11.17%	Kurang
2022	163.616.303.916	1.178.979.065.165	13.88%	Kurang

Sumber: Data diolah (2023)

Keterangan diatas berdasarkan klarifikasi kriteria yang digunakan untuk menilai rasio derajat desentralisasi fiskal sebagai berikut:

Tabel 4.3

Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi fiskal %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Bisma (2010)

4.2.2 Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2014) mengemukakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah.

Tabel 4.4
Data Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer
2019	187.752.107.000	888.050.439.712
2020	125.559.974.000	835.294.115.359
2021	123.145.081.957	929.848.360.219
2022	163.616.303.916	966.985.226.574

Sumber : Data diolah (2023)

Rumus perhitungan dari rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{Penda[atran Transfer]} \times 100\%$$

Sumber: Kusuma (2014)

Rasio kemandirian dihitung sebagai berikut:

- a. Rasio kemandirian tahun 2019 = $\frac{187.752.107.000}{888.050.439.712} \times 100\%$
= 21.14%
- b. Rasio kemandirian tahun 2020 = $\frac{125.559.974.000}{835.294.115.359} \times 100\%$
= 15.03%
- c. Rasio kemandirian tahun 2021 = $\frac{123.145.081.957}{929.848.360.219} \times 100\%$
= 13.24%
- d. Rasio kemandirian tahun 2022 = $\frac{163.616.303.916}{966.985.226.574} \times 100\%$
= 16.92%

Tabel 4.5
Perbandingan Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah dan
Pendapatan Transfer

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase	Keterangan
2019	187.752.107.000	888.050.439.712	21.14%	Rendah sekali
2020	125.559.974.000	835.294.115.359	15.03%	Rendah sekali
2021	123.145.081.957	929.848.360.219	13.24%	Rendah sekali
2022	163.616.303.916	966.985.226.574	16.92%	Rendah sekali

Sumber : Data diolah (2023)

Keterangan diatas berdasarkan klarifikasi kriteria yang digunakan untuk menilai rasio kemandirian sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Kusuma (2014)

4.2.3 Rasio Efektivitas

Menurut Mahmudi (2016) mengemukakan bahwa semakin tinggi efektivitas kinerja semakin baik dan semakin rendah efektivitas berarti akan semakin buruk.

Tabel 4.7
Data Realisasi PAD dan Anggaran PAD

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD
2019	119.464.168.341	187.725.107.000
2020	110.936.063.512	125.559.974.000
2021	87.883.164.973	123.145.081.957
2022	170.331.502.274	163.616.303.916

Sumber : Data diolah (2023)

Rumus perhitungan dari rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi 2010

Rasio efektivitas dihitung sebagai berikut:

$$a. \text{ Rasio efektivitas tahun 2019} = \frac{119.464.168.341}{187.725.107.000} \times 100\%$$

$$= 63.64\%$$

$$b. \text{ Rasio efektivitas tahun 2020} = \frac{110.936.063.512}{125.559.974.000} \times 100\%$$

$$= 88.35\%$$

$$c. \text{ Rasio efektivitas tahun 2021} = \frac{87.883.164.973}{123.145.081.957} \times 100\%$$

$$= 71.37\%$$

$$d. \text{ Rasio efektivitas tahun 2022} = \frac{170.331.502.274}{163.616.303.916} \times 100\%$$

$$= 104.10\%$$

Tabel 4.8
Rasio Efektivitas Realisasi PAD dan Anggaran PAD

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Persentase	Keterangan
2019	119.464.168.341	187.725.107.000	63.64%	Kurang efektif
2020	110.936.063.512	125.559.974.000	88.35%	Cukup efektif
2021	87.883.164.973	123.145.081.957	71.37%	Kurang efektif
2022	170.331.502.274	163.616.303.916	104.10%	Sangat efektif

Sumber : Data diolah (2023)

Keterangan diatas berdasarkan klarifikasi kriteria yang digunakan untuk menilai rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel 4.9
Kategori Tingkat Efektivitas PAD

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
Sangat efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	<60%

Sumber: Mahmudi 2016

4.2.4 Rasio Efisiensi

Menurut Halim (2016) mengemukakan bahwa semakin besar out put dibandingkan input, maka semakin tinggi efisiensi organisasi.

Tabel 4.10
Data Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah
2019	979.371.368.464	1.190.812.429.313
2020	925.348.493.641	1.132.684.863.345
2021	867.918.072.184	1.102.376.766.452
2022	997.314.352.809	1.178.979.065.165

Sumber : Data diolah (2023)

Rumus perhitungan dari rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010)

Rasio efisiensi dihitung sebagai berikut:

$$a. \text{ Rasio efisiensi tahun 2019} = \frac{979.371.368.464}{1.190.812.429.313} \times 100\%$$

$$= 82.24\%$$

$$b. \text{ Rasio efisiensi tahun 2020} = \frac{925.348.493.641}{1.132.684.863.345} \times 100\%$$

$$= 81.70\%$$

$$c. \text{ Rasio efisiensi tahun 2021} = \frac{867.918.072.184}{1.102.376.766.452} \times 100\%$$

$$= 78.73\%$$

$$d. \text{ Rasio efisiensi tahun 2022} = \frac{997.314.352.809}{1.178.979.065.165} \times 100\%$$

$$= 84.59\%$$

Tabel 4.11
Rasio Efisiensi Realisasi PAD dan Anggaran PAD

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase	Keterangan
2019	979.371.368.464	1.190.812.429.313	82.24%	Efisien
2020	925.348.493.641	1.132.684.863.345	81.70%	Efisien
2021	867.918.072.184	1.102.376.766.452	78.73%	Efisien
2022	997.314.352.809	1.178.979.065.165	84.59%	Efisien

Sumber : Data diolah (2023)

Keterangan diatas berdasarkan klarifikasi kriteria yang digunakan untuk menilai rasio efisiensi sebagai berikut:

Tabel 4.12
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Tidak efisien	>100%
Efisiensi berimbang	100%
Efisien	<100%

Sumber: Mahmudi (2016)

4.3 Pembahasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi pada badan pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja periode 2019-2022. Berikut ini peneliti akan menjelaskan pembahasan dari hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi pada badan pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja.

4.3.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan pada sub 4.2.1 yaitu perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal pada BAPENDA kabupaten Tana Toraja mengalami kenaikan dan penurunan (berfluktiasi) selama periode tahun 2019-2022. Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah dari tahun 2019-2021 secara berturut-turut mengalami penurunan sebesar Rp.187.752.107.000, Rp.125.559.974.000, Rp.123.145.081.957. pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.163.616.303.916 tetapi kenaikannya belum signifikan. Kemudian pada total pendapatan dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan sebesar Rp.1.190.812.429.313, Rp1.132.684.863.534, Rp.1.102.376.766.452,

sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan Rp.1.178.979.065.165 tetapi kenikannya belum signifikan.

Berdasarkan perbandingan rasio derajat desentralisasi pada tahun 2019 yang berada pada persentase sebesar 15.77% yang dikategorikan kurang begitupun pada tahun 2020 yang memiliki presentasi 11.09% yang masih dikategorikan kurang karena berada dalam skala 10,01–20,00.

Berdasarkan perhitungan dan standar rasio derajat desentralisasi pada 2021 mengalami kenaikan dimana persentasinya sebesar 11.17% dan di kategori kurang begitupun tahun 2022 meski mengalami kenaikan dimana persentasinya sebesar 13.88% namun masih dikategorikan kurang karena berada dalam skala 10,01–20,00. Meski mengalami kenaikan pada 2 tahun terakhir namun seluruhnya dikatakan kemampuan keuangan Bapenda Kabupaten Tana Toraja masih dikategorikan kurang, yang berarti bahwa pemerintah kabupaten Tana Toraja dalam 4 tahun yaitu 2019-2022 dianggap bahwa belum mampu dalam melaksanakan desentralisasi fiskal atau dengan kata lain belum mampu berdiri sendiri tetapi masih bergantung kepada pusat.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Herla Sertika S.E selaku bagian keuangan badan pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja beliau mengatakan bahwa :

“Pada tahun 2019-2021 Pendapatan asli daerah (PAD) serta total pendapatan daerah mengalami penurunan hal ini disebabkan karena selama masa pandemi banyak kegiatan yang terhambat atau tidak dapat berjalan seperti biasanya seperti banyaknya tempat wisata yang ditutup akibatnya pemungutan pajak dan retribusi mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dikarenakan objek wisata di Tana Toraja sudah mulai beroperasi yang tentunya akan berdampak terhadap kenaikan pendapatan asli daerah”

Wawancara ini sesuai dengan hasil perhitungan karena pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan karena terjadi covid-19

sehingga penerimaan daerah dari sektor pariwisata dan pajak mengalami penurunan, penurunan itu berada pada kisaran 11.17% hingga 15.77% yang terjadi 4 tahun berturut-turut meskipun pada tahun 2022 mengalami kenaikan tetapi kenaikannya belum signifikan sehingga masih dikategorikan kurang”.

Berdasarkan hasil perhitungan dan wawancara tersebut diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari hasil analisis rasio derajat desentralisasi fiskal selama 4 tahun terakhir berada pada skala kurang, dapat dikatakan kurang karena adanya dampak covid-19 dimana penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan karena dampak covid-19 sehingga berpengaruh pada sektor pariwisata, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan tentunya ini akan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Total pendapatan selama 4 tahun mengalami penurunan, penurunan itu terjadi karena kurangnya pemasukan dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah kecuali pada tahun 2022 mengalami kenaikan meskipun mengalami kenaikan tetapi kenaikannya belum signifikan. Dengan indikator kurang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah Tana Toraja selama kurung waktu 4 tahun dianggap belum mampu membiayai belanja daerahnya karena total pendapatan asli daerah masih sangat kurang, dan masih bergantung ke pemerintah pusat sehingga pemerintah harus lebih berupaya untuk meningkatkan jumlah PAD baik dengan menggali potensi baru ataupun potensi-potensi yang sudah ada sebelumnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016) Rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap

total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati (2016) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran (2011-2013) dan Natalia (2015) Analisis Laporan Keuangan Daerah Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal masih tergolong sangat kurang. Hal tersebut juga terjadi pada penelitian ini di Kabupaten Tana Toraja dimana jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal masih tergolong sangat kurang

4.3.2 Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil perhitungan pada sub 4.2.2 yaitu perhitungan rasio kemandirian dapat diketahui bahwa rasio kemandirian pada BAPENDA Kabupaten Tana Toraja tahun periode 2019-2022 selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa PAD dari tahun 2019-2021 secara berturut-turut mengalami penurunan sebesar Rp.187.752.107.000, Rp. 125.559.974.000, Rp. 123.145.081.957, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 163.616.303.916 tetapi kenaikannya belum signifikan. Kemudian pendapatan transfer dari tahun periode 2019-2020 secara berturut-turut mengalami penurunan sebesar Rp.888.050.439.712, Rp. 835.294.115.359, pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan secara berturut-turut sebesar Rp. 929.848.360.219, Rp 966.985.226.574 tetapi kenaikannya belum signifikan.

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio kemandirian diperoleh presentase 21,14%-13,24% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 16,92 persen yang berarti bahwa rasio kemandirian kabupaten Tana toraja berada pada skala rendah sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Herla Sartika S.E selaku bagian keuangan badan pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja beliau mengatakan bahwa :

“Pada tahun 2019-2022 terjadi penurunan pendapatan asli daerah serta pendapatan transfer pusat sehingga rasio kemandirian dikategorikan ”rendah” menurunnya pendapatan asli daerah akibat beberapa objek pariwisata, serta penerimaan pajak dan retribusi yang tidak mencapai target”

Wawancara ini sesuai dengan hasil perhitungan rasio kemandirian yang membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer dimana pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan, penurunan itu terjadi karena kurangnya pemasukan dari sektor pariwisata, pajak daerah, pajak retribusi, lain-lain pendapatan sah, pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer antar daerah sedangkan pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan, kenaikan itu terjadi karena meningkatnya pendapatan pada sektor pariwisata, pajak daerah dan pajak retribusi. Dari sisi pendapatan asli daerah selama 3 tahun mengalami penurunan kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan tetapi kenaikan itu tidak signifikan ditambah dengan penerimaan asli daerah dari sektor perpajakan dan sektor pariwisata mengalami penurunan, penurunan itu berada pada kisaran 13-24%-21.14% sehingga berdasarkan hasil perhitungan selama 4 tahun berturut-turut masih dikategorikan rendah sekali.

Berdasarkan hasil perhitungan dan wawancara, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis rasio kemandirian selama 4 tahun terakhir berada pada skala rendah sekali, dapat dikatakan rendah sekali karena adanya dampak covid-19 dimana penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan karena dampak covid-19 sehingga berpengaruh pada sektor pariwisata yang mengakibatkan adanya pembatasan kunjungan atau tempat wisata yang di tutup, begitu juga dengan retribusi daerah, pajak daerah

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tentunya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pendapatan transfer dari pusat selama 4 tahun mengalami penurunan, penurunan itu terjadi karena menurunnya transfer pendapatan yang berasal dari pusat maupun antar daerah, kecuali pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan, kenaikan itu disebabkan karena meningkatnya pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dengan indikator rendah sekali maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja masih belum mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan masih berharap pada pendapatan transfer dari pusat. Dari hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian kabupaten Tana Toraja berada pada skala rendah sekali yang berarti bahwa dalam mendanai anggaran pendapatan daerah sebagian besar pemerintah daerah Tana Toraja masing bergantung ke pendapatan Transfer dari pusat, hal itu dapat dilihat di laporan keuangan daerah (tabel 4.5) dari Total pendapatan asli daerah hanya menyumbang sebesar 21%-13% dalam kurun waktu 4 tahun terhadap total pendapatan Daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Halim (2014) bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Promono (2014) Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dan Rahmayati (2016) Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran (2011-2013) jika dilihat dari rasio kemandirian tergolong rendah sekali atau instruktif. Hal tersebut juga terjadi pada penelitian ini di Kabupaten Tana Toraja dimana jika dilihat dari rasio kemandirian masih tergolong rendah sekali atau instruktif.

4.3.3 Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan pada sub 4.2.3 yaitu perhitungan rasio efektivitas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pada BAPENDA Kabupaten Tana Toraja tahun 2019-2022 selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. . Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2019-2021 secara berturut-turut mengalami penurunan sebesar Rp.119.464.168.341, Rp.110.936.063.512, Rp.87.883164.973, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.170.331.502.274. Kemudian anggaran pendapatan asli daerah dari tahun 2019-2021 secara berturut-turut mengalami penurunan sebesar Rp.187.725.107.000, Rp.125.559.974.000, Rp.123.145.081.957. pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 163.616.303.916.

Berdasarkan perbandingan rasio eektivitas pada tahun 2019 memiliki presentasi 63.64% yang dikategorikan kurang efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat diantara 60% - 80%. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan dimana presentasinya 88.35% yang dikategorikan cukup efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di antara 80% - 90%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan dimana presentasinya 71.37% yang dikategorikan kurang efektif karena tingkat efektivitasnya berada di antara 60%-80%. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dimana presentasinya sebesar 104.10% yang dikategorikan sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%.

Dari hasil wawancara dengan ibu Herla Sartika S.E selaku bagian keuangan badan pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja beliau mengatakan bahwa

“Secara tingkat efektivitas pada tahun 2019 kurang efektif karena pada saat itu sudah pandemi covid-19 sehingga mengakibatkan banyak kegiatan yang terhambat dan

tidak dapat berjalan seperti biasanya seperti banyaknya tempat wisata yang ditutup akibatnya pemungutan pajak dan retribusi terhambat yang pastinya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, kemudian pada tahun 2020 cukup efektif karena pemerintah mampu merealisasikan anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2021 kurang efektif karena pemerintah masih kurang mampu dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya sesuai dengan target yang di tetapkan sedangkan pada tahun 2022 sangat efektif karena kegiatan pemerintah daerah dapat merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang di tetapkan”.

Berdasarkan hasil perhitungan dan wawancara tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari hasil analisis rasio efektivitas pada tahun 2019 dan 2021 kurang efektif karena pemerintah daerah masih kurang mampu dalam merealisasikan target yang di tetapkan karena adanya dampak covid-19 sehingga beberapa objek vital yang merupakan sumber pendapatan daerah belum beraktivitas secara normal.

Dan pada tahun 2020 berada pada skala cukup efektif karena pemerintah daerah kabupaten Tana Toraja sudah mampu merealisasikan anggaran pendapatan asli daerah sedangkan pada tahun 2022 berada pada indikator sangat efektif yang berarti pemerintah daerah sudah dapat merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan sah lainnya yang tentunya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten tana Toraja.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas dapat menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Rasio

efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lazyra (2015) Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan dan Pramono (2014) Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta) jika dilihat dari rasio efektivitas tergolong efektif. Hal tersebut juga terjadi pada penelitian ini di Kabupaten Tana Toraja dimana jika dilihat dari rasio efektivitas tergolong efektif.

4.3.4 Rasio Efisiensi

Berdasarkan perhitungan pada sub 4.2.4 yaitu perhitungan rasio efisiensi dapat diketahui bahwa rasio efisiensi pada BAPENDA Kabupaten Tana Toraja tahun 2019-2022 selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah dari tahun 2019-2021 secara berturut-turut mengalami penurunan sebesar Rp.979.371.368.464, Rp.925.348.493.641, Rp.867.918.072.184, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.997.314.352.809. Kemudian realisasi anggaran pendapatan daerah dari tahun periode 2019-2021 berturut-turut mengalami penurunan sebesar Rp.1.190.812.429.313, Rp.1.132/684.863.345, Rp.1.102.376.766.452, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.178.979.065.168 tetapi kenikannya signifikan.

Berdasarkan perbandingan rasio efisiensi pada tahun 2019 memiliki presentasi sebesar 82.24% yang dikategorikan efisien karena tingkat efisiensinya berada pada kurang dari 100%. Namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 yang memiliki presentasi 81.70% yang dikategorikan efisien karena tingkat efisiensinya berada pada kurang dari 100%.

Namun pada tahun 2021 juga mengalami penurunan yang memiliki presentasi 78.73% yang masih dikategorikan efisien karena tingkat efisiensinya berada pada kurang dari 100%. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang memiliki presentasi 84.58% yang dikategorikan efisien karena tingkat efisiensinya berada pada kurang dari 100%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Herla Sartika S.E selaku bagian keuangan badan pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja beliau mengatakan bahwa :

“Dari tahun 2019-2022 bisa dikatakan efisien karena realisasi anggaran pendapatan daerah lebih besar dari realisasi belanja daerah, surplus ini terjadi karena pendapatan daerah lebih besar dari belanja, apabila mengalami surplus tidak berarti daerah memiliki kelebihan kas, namun hal ini terjadi karena realisasi pendapatan daerah lebih besar dari realisasi belanja daerah. Surplus anggaran pendapatan tersebut dapat dianggarkan oleh daerah untuk pembayaran pokok utang, pembangunan infrastruktur dll atau dialihkan ke tahun berikutnya. ” wawancara ini sesuai dengan hasil perhitungan karena pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan namun masih dapat dikategorikan efektif karena tingkat efisiensinya kurang dari 100%.

Berdasarkan hasil perhitungan dan wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari hasil analisis rasio efisiensi selama 4 tahun terakhir berada pada skala efisien, dapat dikatakan efisien karena realisasi belanja daerah lebih kecil dari total pendapatan daerah. Dengan indikator efisien maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja sudah mampu menerapkan efisiensi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016) rasio efisiensi keuangan menggambarkan perbandingan umum antara

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang sebesarnya diterima. Mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, penerimaan daerah dapat dikatakan efisiensi jika rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Natalia (2015) Analisis Laporan Keuangan Daerah Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Slemsan dan Lazyra (2016) Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan jika dilihat dari rasio efiseinsi tergolong efektif. Hal tersebut juga terjadi pada penelitian ini di Kabupaten Tana Toraja dimana jika dilihat dari rasio efektif karena realisasi belanja daerahnya tidak melebihi anggaran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kinerja keuangan badan pendapatan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan kurang, karena berada dalam skala 10,01%-20.00%. Berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan 2022 rasionya masing-masing sebesar: 15.77%, 11.09%, 11.17% dan 13.88%.
- b. Kinerja keuangan badan pendapatan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong masih rendah sekali dan pola hubungannya termasuk dalam pola hubungan instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-24%. Berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan 2022 rasionya masing-masing sebesar: 21.14%, 15.03%, 13.24%, dan 16,92%.
- c. Kinerja keuangan badan pendapatan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari rasio efektivitas, pada tahun 2019 tergolong kurang efektif karena persentasinya 63.64% yang berada diantara skala 60%-80%. Pada tahun 2020 tergolong cukup efektif karena persentasinya 88.35% yang berada diantara skala 80%-90%. Kemudian pada tahun 2021 tergolong kurang efektif karena persentasinya 71.37% yang berada diantara skala 60%-80%. Dan pada tahun 2022 tergolong sangat efektif karena persentasinya 104.10% yang berada diantara skala >100%.

- d. Kinerja keuangan badan pendapatan daerah kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari rasio efisiensi dapat dikategorikan efisien karena berada dalam skala <100%. Berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan 2022 rasionya masing-masing sebesar: 82.24%, 81.70%, 78.73% dan 84.59%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dan masukan yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja masih sangat perlu memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerahnya karena masih tergolong rendah. Peningkatan PAD bisa dilakukan pemerintah dengan cara memaksimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah. selain itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
- b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambahkan rasio menggunakan rasio keserasian dan rasio pertumbuhan sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anim Rahmayati (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No. 1 Maret 2016*
- Aryani, D. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta (Id): RI .*
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah .*
- Lazyra. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan (SKRIPSI). Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Listiyani Natalia. (2015). Analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten sleman.
- Mahmudi. (2010). Manajemen keuangan daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., & Elim, I. (2014). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- Pratama, A. P. (2021). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang tahun anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 236-242. *Keuangan Pada Badan Pendapatan daerah Tana Toraja (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).*
- Ronal, M., & Massua, A. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *In Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi (Vol. 1, No. 2, pp. 181-189).*
- Sarjiyati, S., & Haryani, A. T. (2020). Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di

Kabupaten Ngawi. YUSTISIA MERDEKA: *Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1).

Setyosari, H. Punaji. *Metode penelitian pendidikan & pengembangan*. Prenada Media, 2016.

Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Analisis kinerja keuanganserta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang tahun anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 236-242.

Sugiyono. (2019). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive)*.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Penerbit : Alfabeta. Bandung

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Wahyuni, N.(2010). Analisis rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah kota malang. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 1(1).

Wakhyudi.(2013). Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Vol. 1 No. 2, 2013.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019 dan 2018**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
I.	PENDAPATAN - LRA	1.130.320.148.000,00	1.190.812.429.313,00	89,63	-
I.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	187.792.187.000,00	119.464.168.341,55	63,63	-
I.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	13.000.000.000,00	12.366.450.845,00	95,13	-
I.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	435.000.000,00	392.191.915,00	90,16	-
I.1.1.06.04	Hotel Bintang Tiga - LRA	150.000.000,00	189.191.000,00	126,13	-
I.1.1.06.04	Hotel Bintang Dua - LRA	50.000.000,00	104.616.100,00	209,23	-
I.1.1.06.07	Hotel Melati Tiga - LRA	50.000.000,00	34.024.740,00	68,07	-
I.1.1.06.09	Hotel Melati Dua - LRA	50.000.000,00	23.052.000,00	46,11	-
I.1.1.06.09	Hotel Melati Satu - LRA	50.000.000,00	3.979.070,00	7,96	-
I.1.1.06.15	Tunggakan Pajak Hotel - LRA	135.000.000,00	115.965.420,00	85,90	-
I.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	425.000.000,00	460.364.120,00	108,32	-
I.1.1.07.01	Restoran - LRA	250.000.000,00	264.179.100,00	105,67	-
I.1.1.07.02	Rumah Makan - LRA	100.000.000,00	72.888.000,00	72,89	-
I.1.1.07.03	Kafetaria - LRA	50.000.000,00	10.409.000,00	20,82	-
I.1.1.07.09	Tunggakan Pajak Restoran - LRA	150.000.000,00	93.307.490,00	62,24	-
I.1.1.07.10	Tunggakan Pajak Kafe - LRA	50.000.000,00	3.764.500,00	7,53	-
I.1.1.07.11	Tunggakan Pajak Rumah Makan - LRA	20.000.000,00	10.850.000,00	54,25	-
I.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	25.000.000,00	13.082.500,00	52,33	-
I.1.1.08.04	Karaoke - LRA	7.000.000,00	12.184.000,00	174,06	-
I.1.1.08.14	Balap Kendaran Bermotor - LRA	8.000.000,00	-	-	-
I.1.1.08.15	Pernaihan Keagungan - LRA	5.000.000,00	868.000,00	17,36	-
I.1.1.09	Pajak Retelme - LRA	1.635.000.000,00	903.444.503,00	55,25	-
I.1.1.09.01	Raklame	1.500.000.000,00	119.307.893,00	7,99	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
I.1.1.16	Bisa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPH/TB) - LRA	500.000.000,00	1.475.741.985,00	295,15	-
I.1.1.16.01	BPH/TB - Perolehan Hak - LRA	500.000.000,00	1.475.741.985,00	295,15	-
I.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	17.000.000.000,00	12.803.711.427,00	75,32	-
I.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	500.000.000,00	770.090.200,00	154,02	-
I.1.2.01.07	Pelayanan Kesehatan-LRA	500.000.000,00	770.090.200,00	154,02	-
I.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	150.000.000,00	127.035.000,00	84,69	-
I.1.2.02.04	Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	150.000.000,00	127.035.000,00	84,69	-
I.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parlor di Tepi Jalan Umum - LRA	600.000.000,00	409.950.000,00	68,33	-
I.1.2.05.01	Penyediaan Pelayanan Parlor di Tepi Jalan Umum - LRA	600.000.000,00	409.950.000,00	68,33	-
I.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.011.000.000,00	796.877.500,00	79,17	-
I.1.2.06.02	Retribusi Sewa Kios/Lods - LRA	260.100.000,00	187.100.000,00	71,93	-
I.1.2.06.03	Pelayanan Pasar - LRA	500.000.000,00	466.768.000,00	93,35	-
I.1.2.06.04	Retribusi Pasar Hewan - LRA	70.000.000,00	26.510.000,00	37,87	-
I.1.2.06.05	Tunggakan Retribusi Sewa Kios/Lods - LRA	100.000.000,00	54.469.500,00	54,47	-
I.1.2.06.06	Tunggakan Retribusi Pasar Hewan - LRA	1.000.000,00	100.000,00	10,00	-
I.1.2.07	Retribusi Pengisian Kendaraan Bermotor - LRA	100.000.000,00	113.023.500,00	113,02	-
I.1.2.07.12	Pengisian Kendaraan Bermotor - LRA	100.000.000,00	113.023.500,00	113,02	-
I.1.2.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Pemeliharaan Kales - LRA	40.000.000,00	2.000.000,00	5,00	-
I.1.2.10.01	Retribusi Penyediaan dan/atau Pemeliharaan Kales - LRA	40.000.000,00	2.000.000,00	5,00	-
I.1.2.14	Retribusi Pengendalian Marana Telekomunikasi - LRA	240.000.000,00	200.724.400,00	83,64	-
I.1.2.14.02	Pengendalian Marana Telekomunikasi - LRA	240.000.000,00	200.724.400,00	83,64	-
I.1.2.14.03	Pengendalian Marana Telekomunikasi - LRA	200.000.000,00	189.080.800,00	94,54	-
I.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah - LRA	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	-
I.1.2.15.05	Retribusi Sewa Pemakaian Kelayakan Daerah - LRA	740.550.000,00	471.635.000,00	63,57	-

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2020 dan 2019**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
I.	PENDAPATAN - LRA	1.148.014.403.000,00	1.132.684.863.524,75	98,69	-
I.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	134.536.974.000,00	110.936.063.512,19	82,53	-
I.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	11.000.000.000,00	11.028.317.168,50	100,26	-
I.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	500.000.000,00	260.728.734,00	52,15	-
I.1.1.06.04	Hotel Bintang Tiga - LRA	150.000.000,00	52.527.359,00	35,02	-
I.1.1.06.05	Hotel Bintang Dua - LRA	180.000.000,00	5.000.000,00	2,78	-
I.1.1.06.07	Hotel Melati Tiga - LRA	50.000.000,00	56.025.908,00	112,05	-
I.1.1.06.09	Hotel Melati Dua - LRA	50.000.000,00	12.504.500,00	25,01	-
I.1.1.06.09	Hotel Melati Satu - LRA	20.000.000,00	1.300.395,00	6,50	-
I.1.1.06.15	Tunggakan Pajak Hotel - LRA	50.000.000,00	153.370.662,00	306,74	-
I.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	450.000.000,00	310.004.638,00	68,89	-
I.1.1.07.01	Restoran - LRA	270.000.000,00	137.689.691,00	50,77	-
I.1.1.07.02	Rumah Makan - LRA	110.000.000,00	29.888.000,00	27,15	-
I.1.1.07.03	Kafetaria - LRA	30.000.000,00	-	-	-
I.1.1.07.09	Tunggakan Pajak Restoran - LRA	30.000.000,00	242.378.948,00	474,60	-
I.1.1.07.10	Tunggakan Pajak Kafe - LRA	5.000.000,00	-	-	-
I.1.1.07.11	Tunggakan Pajak Rumah Makan - LRA	5.000.000,00	668.000,00	13,36	-
I.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	25.000.000,00	16.025.320,00	64,10	-
I.1.1.08.07	Karaoke - LRA	15.000.000,00	16.025.320,00	106,84	-
I.1.1.08.14	Balap Kendaran Bermotor - LRA	5.000.000,00	-	-	-
I.1.1.08.15	Pernaihan Keagungan - LRA	5.000.000,00	-	-	-
I.1.1.09	Pajak Retelme - LRA	660.000.000,00	770.828.423,00	116,79	-
I.1.1.09.01	Raklame	200.000.000,00	221.848.408,00	110,92	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
I.1.1.16	Bisa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPH/TB) - LRA	1.125.000.000,00	1.224.826.479,50	108,87	-
I.1.1.16.01	BPH/TB - Perolehan Hak - LRA	1.125.000.000,00	1.224.826.479,50	108,87	-
I.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	10.000.000.000,00	7.163.530.253,75	71,64	-
I.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	775.000.000,00	896.557.347,00	115,68	-
I.1.2.01.07	Pelayanan Kesehatan-LRA	775.000.000,00	896.557.347,00	115,68	-
I.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	150.000.000,00	62.820.000,00	41,88	-
I.1.2.02.04	Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	150.000.000,00	62.820.000,00	41,88	-
I.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parlor di Tepi Jalan Umum - LRA	500.000.000,00	90.570.000,00	18,11	-
I.1.2.05.01	Penyediaan Pelayanan Parlor di Tepi Jalan Umum - LRA	500.000.000,00	90.570.000,00	18,11	-
I.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	891.000.000,00	318.448.500,00	35,74	-
I.1.2.06.02	Retribusi Sewa Kios/Lods - LRA	300.000.000,00	21.838.000,00	7,28	-
I.1.2.06.03	Pelayanan Pasar - LRA	500.000.000,00	245.212.000,00	49,05	-
I.1.2.06.04	Retribusi Pasar Hewan - LRA	40.000.000,00	13.662.500,00	34,01	-
I.1.2.06.05	Tunggakan Retribusi Sewa Kios/Lods - LRA	50.000.000,00	27.378.500,00	74,76	-
I.1.2.06.06	Tunggakan Retribusi Pasar Hewan - LRA	1.000.000,00	397.500,00	39,75	-
I.1.2.07	Retribusi Pengisian Kendaraan Bermotor - LRA	100.000.000,00	130.200.000,00	130,20	-
I.1.2.07.12	Pengisian Kendaraan Bermotor - LRA	100.000.000,00	130.200.000,00	130,20	-
I.1.2.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Pemeliharaan Kales - LRA	20.250.000,00	79.250.000,00	391,36	-
I.1.2.10.01	Retribusi Penyediaan dan/atau Pemeliharaan Kales - LRA	20.250.000,00	79.250.000,00	391,36	-
I.1.2.14	Retribusi Pengendalian Marana Telekomunikasi - LRA	180.000.000,00	136.515.200,00	75,84	-
I.1.2.14.02	Pengendalian Marana Telekomunikasi - LRA	180.000.000,00	136.515.200,00	75,84	-
I.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah - LRA	610.000.000,00	346.080.425,00	56,73	-
I.1.2.15.05	Retribusi Sewa Pemakaian Kelayakan Daerah - LRA	600.000.000,00	346.080.425,00	57,68	-
I.1.2.15.06	Tunggakan Retribusi Sewa Rumah	10.000.000,00	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Sultan Hasanuddin No. 3 Makale Telp. (0423) 22562 Fax. (0423) 22814
 Email: bpkpdanatoraja@gmail.com
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepada

Nomor : 800.780/BPKPD-01/500/V/2023
 Perihal : Persetujuan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
 dan Ilmu-Ilmu Sosial
 Universitas Fajar
 di-
 Tempat

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar No. 340/B/DFEIS-UNIFAA/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian bagi Mahasiswa :

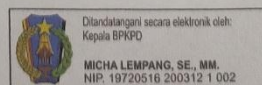
Nama : MEI TINCE LARA
 NIM. : 1910321034
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi

Pada prinsipnya kami menyetujui dengan ketentuan Mahasiswa tersebut mematuhi tata tertib yang berlaku pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Tana Toraja.

Demikian disampaikan, untuk proses selanjutnya.

Dikeluarkan di Makale
 pada tanggal 10 Mei 2023
 =====

KEPALA BADAN,



DOKUMENTASI

